

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini sudah mengancam kehidupan manusia, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan Nasional. Pembangunan menurut Siagian (2005, hlm. 3) mendefinisikan bahwa “Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*)”. Definisi tersebut, dapat diartikan pembangunan adalah usaha sadar dan terencana untuk menuju kesejahteraan bangsa, maka pembangunan lingkungan hidup adalah upaya mengelola seluruh potensi sumberdaya lingkungan agar memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Pembangunan telah memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi di lain pihak perkembangan kondisi lingkungan hidup dihadapkan dengan dampak negatif dari pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri telah mengubah lahan pesawahan menjadi kawasan industri yang tidak berwawasan lingkungan yang menyebabkan pencemaran air, udara, tanah, bahkan limbah berbahaya dan beracun telah mengubah kondisi alam menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Pakar lingkungan hidup Sumarwoto (2004, hlm. 51) mengemukakan bahwa “Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya”. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup harus dapat mengelola, memanfaatkan serta melindungi sumberdaya alam agar dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan dapat dipertahankan kelestariannya.

Selanjutnya, rendahnya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya, bahkan berpengaruh pada perilaku yang tidak ramah dengan lingkungan. Sejalan dengan hal diatas pendidikan dikemukakan oleh Syaefudin & Makmun (2005, hlm. 6) bahwa:”Pendidikan merupakan upaya yang dapat

mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik”. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tugas untuk mengelola dan melestarikan alam, untuk itu manusia perlu mempunyai pengetahuan tentang alam yang menjadi tanggungjawabnya.

Namun secara umum masyarakat belum menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat dilihat dari fakta yang ditemui seperti :

- a. Kualitas air sungai semakin tercemar, karena adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai.
- b. Masyarakat yang membangun industri masih melakukan pelanggaran, seperti ketika melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan dokumen lingkungan terjadi pencemaran udara, air, dan tanah, membuang limbah beracun tanpa diolah dulu sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
- c. Pengembangan dan pembangunan perumahan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 3,2 juta jiwa dengan *Total Fertility Rate* (TFR) 2,56 tahun 2010 (Sensus Penduduk BPS tahun 2010) berdampak pada hilangnya lahan resapan air serta meningkatnya limbah domestik sebesar 86% yang dibuang langsung ke sungai dari aktivitas rumah tangga yang juga mempengaruhi kualitas lingkungan (Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air BPLH tahun 2009).

Rendahnya pendidikan masyarakat tentang lingkungan hidup juga terjadi di sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar. Kondisi saat ini masih banyak sekolah yang belum berwawasan lingkungan, padahal pendidikan lingkungan hidup seharusnya dimulai sejak dini agar terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) tentang lingkungan. Perbaikan lingkungan hidup tidak saja diselesaikan dengan teknologi semata, tetapi perlu dilakukan perubahan perilaku melalui proses pendidikan. Dalam mekanisme pendidikan menurut Sumaatmaja (2002, hlm. 41) mengemukakan bahwa:

Ada proses, proses kegiatan, kegiatan perilaku yang dikembangkan (diubah) meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan, obyek-subyek pelaku meliputi anggota masyarakat, peserta didik, orang yang lebih tua, metode yang

diterapkan pembakuan (standar) yang menjadi ukuran, yaitu kedewasaan, kematangan, perilaku yang diharapkan.

Perlindungan dan penyelamatan lingkungan perlu dilakukan melalui pendidikan, Perubahan perilaku masyarakat untuk dapat mengelola lingkungan hidup supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Kondisi pada saat ini, masih ditemukan sekolah yang secara fisik belum berwawasan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Lingkungan sekolah yang masih kotor tidak terawat baik ruang belajar dan lingkungan di dalam dan disekitar sekolah, karena warga sekolah belum memahami tentang lingkungan hidup atau mungkin belum terbiasa dengan budaya hidup bersih, sehingga warga sekolah belum menyadari arti penting kebersihan, kenyamanan bagi tempat belajar dan mengajar.
- b. Sekolah masih kelihatan gersang karena tidak ada penghijauan, ruang terbuka hijau, lahan kosong yang tidak ditanami pohon ataupun saluran drainase yang belum terawat dengan baik, sehingga dijumpai genangan air yang terkesan kotor.
- c. Warga sekolah masih terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya, baik karena perilaku atau karena tidak ada fasilitas untuk membuang sampah padahal keberadaan sampah yang belum dikelola dengan baik memberikan kesan sekolah kotor.

Kondisi ini perlu dilakukan perubahan melalui pendidikan lingkungan hidup, sekolah diharapkan membawa perubahan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan hal di atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam (Bab II, pasal 3) menyebutkan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan berdasarkan undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa melalui proses pendidikan manusia akan mempunyai kemampuan tentang

sesuatu yang dipelajarinya, dari hasil pendidikan itu akan membentuk watak atau karakter dalam dirinya kemudian menjadi budaya secara umum tentang apa yang diketahui dan dipelajarinya. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup diharapkan akan merubah karakter peserta didik untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi di atas Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tentang lingkungan hidup diantaranya melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Kemudian dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup”.

Berdasarkan undang-undang tersebut persoalan lingkungan perlu diupayakan melalui proses pendidikan yang dilakukan sejak dini, agar terjadi perubahan perilaku yang lebih bijak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai hak mendapat pendidikan lingkungan hidup.

Salahsatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan pendidikan lingkungan hidup melalui kesepakatan bersama antara Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Lingkungan Hidup pada Tahun 2010 Tentang Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kebijakan Program Adiwiyata adalah upaya untuk membuat perubahan lingkungan hidup kearah yang lebih baik melalui proses pendidikan. Secara umum kebijakan Program Adiwiyata adalah upaya pemecahan masalah lingkungan hidup untuk menciptakan sumberdaya manusia melalui proses belajar mengajar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Program Adiwiyata adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk

memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan untuk kehidupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut Wahab (2010, hlm. 3) mengemukakan tentang kebijakan bahwa: “Kebijakan (*policy*) adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”.

Selanjutnya Stokey & Zeckhauser (1997, hlm. 4) mengemukakan bahwa: “*Policy analysis consists the major sections, in the first Cornerstones, we establish a framework for thinking about policy problem and making choices. the second and much the longest section, nuts and bolts*”. Sedangkan Tillar dan Nugroho (2009, hlm. 184) mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan”.

Tillar & Nugroho (2009, hlm. 140) mengemukakan pula bahwa: “Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu” .

Sejalan dengan definisi diatas Kebijakan Program Adiwiyata adalah keputusan pemerintah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang sudah mengancam terhadap umat manusia. Kebijakan Program Adiwiyata adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan hidup.

Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup yaitu mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan mendorong masyarakat melalui satuan pendidikan mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam perkembangannya Kebijakan Program Adiwiyata dalam implementasinya belum efektif dilaksanakan. Kebijakan Program Adiwiyata masih dihadapkan dengan permasalahan, hal ini dapat dilihat dari data tahun 2011 secara Nasional dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) baru 1.351 sekolah yang mengikuti atau berpartisipasi program Adiwiyata.

Tabel 1.1
Data Sekolah yang Mengikuti Program Adiwiyata
Tahun 2006-2014

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Tingkat/ Level	P. Jawa	Nasional								
Partisipasi Propinsi	5	17	24	29	31	28	29	33	33	
Partisipasi Sekolah	156	146	248	256	276	269	383	817	938	3.489
Penghargaan										
> Model Sekolah Adiwiyata	10	-	-	-	-	-				10
> Calon Sekolah Adiwiyata	-	30	30	40	37	98				↓
> Sekolah Adiwiyata (1)	-	10	30	30	35	67				↓
> Sekolah Adiwiyata (2)	-	-	10	30	32	32				↓
> Sekolah Adiwiyata Nasional							200	463	On proses (743)	663
> Sekolah Adw Mandiri	-	-	-	10	25	21	67	120	47	290

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan secara Nasional implementasi kebijakan Program Adiwiyata belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sekolah yang berpartisipasi dalam program adiwiyata sebanyak 3.489 sekolah.

Sedangkan data Tahun 2013 BPLH Propinsi Jawa Barat tentang sekolah yang mendapat Penghargaan Adiwiyata dari Kabupaten Bandung dapat dilihat dari table berikut:

Table 1.2
Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2013

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SD Alam Pelopor	Jl. Kaktus Raya No.100 Bumi Rancaekek
2	SMPN 1 Nagreg	Jl.Raya Nagreg KM.37 Kabupaten Bandung
3	SMPN 1 Cimaung	Jl. Desa Cipinang Kecamatan Cimaung

4	SDN Cijawura	Jl.Ciwastra Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari
5	SD Muhammadiyah 7	Kadipaten Raya No 4-6-Antapani Kidul Bandung
6	SDN Karang Pawulang 1	JL. Karawitan No. 81 Bandung Telp. 022-319022
7	SDT Krida Nusantara	JL. Desa Cipadung Cibiru Bandung 40614
8	SDN Sukapura	Jl. Manglayang I No. 1, Cibiru Bandung
9	SMPN 2 Bandung	Jl. Sumatera No 42 Bandung – 40113
10	SMPN 5 Bandung	Jalan Sumatra No. 40 Bandung Telp. 022-207121
11	SMPN 13 Bandung	Jl. Mutiara No.15 Bandung Telp. (022) 7305062

Sumber: BPLHD Propinsi 2013

Sebagaimana permasalahan yang dihadapi ditingkat Nasional dirasakan pula di Kabupaten Bandung, dimana implementasi kebijakan Program Adiwiyata juga belum berjalan sesuai dengan diharapkan. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, peran serta sekolah dalam Program Adiwiyata dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Table 1.3
Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Program Adiwiyata
Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d 2014

NOe	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH					JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	SD	1	0	3	4	0	8
2	SMP	2	1	3	9	11	26
3	SMA	0	0	2	0	0	1

Sumber data: BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014

Sedangkan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan yang mengikuti program Sekolah Berbudaya Lingkungan hidup (SBL) yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Sekolah Dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)
Kabupaten Bandung Tahun 2013/2014

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	SEKOLAH SBL
1	SD + MI	1596	31
2	SMP + MTs	476	11
3	SMA + SMK + MTs	294	1

Sumber : Disdik Kabupaten Bandung

Kemudian, untuk memotivasi agar sekolah berperan dalam program Adiwiyata. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi kepada sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata yang berprestasi melalui pemberian penghargaan baik tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan setiap tahun.

Data sekolah yang Menerima Penghargaan dari Pemerintah dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel. 1.5
Daftar Sekolah Adiwiyata yang Mendapat Penghargaan
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PENERIMA PENGHARGAAN		
		TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT PROPINSI	TINGKTA NASIONAL
1	SD	SD TALENTA SD ALAM PELOPOR SD PERCOBAAN CILEUNYI	SDN 1 MANGGAHANG SDN ALAM PELOPOR SDN TALENTA	SDN 1 MANGGAHANG SD ALAM PELOPOR
2	SMP	SMPN 2 KATAPANG	SMPN 1 MARGAHAYU	SMPN 1 MARGAHAYU
		SMPN 1 MARGAHAYU SMPN NAGREG SMPN CIMAUNG	SMPN NAGREG SMPN CIMAUNG SMPN 1 CIPARAY	SMPN NAGREG SMPN CIMAUNG SMPN 2 DAYEUH KOLOT
		SMPN 1 CIPARAY SMPN 1 CILEUNYI	SMPN 2 CILEUNYI SMPN 2 DAYEUH KOLOT	
		SMPN 2 CILENYI SMPN 3 BALEENDAG SMPN 1 MARGAASIH SMP SANDHY PUTRA SMPN 2 DAYEUH KOLOT		
3	SMA	SMAN 1 MARGAHAYU	SMAN 1 MARGAHAYU	

Sumber data: BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014

Berdasarkan data diatas, dapat dikemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Program Adiwiyata belum berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari 1596 sekolah dasar hanya 31 sekolah atau 2,5% yang mengikuti program Adiwiyata dan 476 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Bandung hanya 11 sekolah yang ikut Program Adiwiyata atau 2,3% dari jumlah sekolah. Begitu juga untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 294 sekolah yang ada hanya 1 yang baru berperan dalam program Adiwiyata, walaupun pemerintah telah memberikan apresiasi melalui pemberian penghargaan kepada sekolah yang berprestasi, tetapi belum mendorong pada peningkatan peran sekolah dalam Program Adiwiyata.

Berdasarkan data diatas maka implementasi kebijakan Program Adiwiyata belum efektif dilaksanakan, hasil pengamatan dan observasi awal yang dilakukan peneliti di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung diperoleh gambaran ada beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Adiwiyata diantaranya:

- 1 Kurangnya informasi yang diterima oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, sehingga baru beberapa sekolah yang melaksanakan program tersebut.
- 2 Sumberdaya manusia yang masih terbatas baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat satuan pendidikan untuk melaksanakan Program Adiwiyata.
- 3 Komunikasi dan Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Badan Pengendalian Lingkungan hidup belum efektif sehingga sinergis program dan kegiatan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan belum terbangun dengan baik masih saling berpegang pada tupoksi masing-masing.
- 4 Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkunga dianggap hanya kegiatan yang sifatnya sukarela, sehingga masih banyak sekolah yang belum melaksanakan program tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Adiwiyata perlu dibuat perencanaan, dan strategi implementasi agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan akan ditentukan oleh implementasinya. Dunn (2003, hlm. 60) mengemukakan secara singkat

tentang implementasi kebijakan bahwa: *“Policy Implementation involves the execution and steering of a course of action over time”*. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan mengeksekusi kebijakan melalui aksi kegiatan. Selanjutnya Dunn (2003, hlm. 43) mengemukakan proses analisis kebijakan adalah *“it is useful to visualize this proses as a series of interdependent activities arrayed throught time- agenda setting, policy formation, policy adoption, policy implantation, policy assessment, policy adaption, and policy termination”*.Selanjutnya, proses analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn (2003, hlm. 43) sebagai berikut: *“Perumusan masalah (Problem Struktur),Peramalan (Forcasting), Rekomendasi (Recommendation),Pemantaun (Monitoring),Evaluasi (Evaluation), Komunikasi (Comunication)”*.

Dengan demikian,Implementasi kebijakan sebagai bagian penting dari proses kebijakan yang harus dilaksanakankarena kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada proses Implementasi kebijakan. Kegagalan suatu kebijakan diakibatkan karena pelaksanaan implementasinya yang tidak tepat, maka keberhasilan Kebijakan Program Adiwiyataakan ditentukan pada tahap pelaksanaan implementasi kebijakan.

B.Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada studi tentang Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata). Kebijakan Program Adiwiyatadiharapkan akan menghasilkan keluaran dan dampak yaitu, seberapa banyak kecenderungan sekolah yang dapat melaksanakan Program Adiwiyata dari jenjang PendidikanSekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan mempengaruhi perubahan perilaku siswa terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Keberhasilan Sekolah sebagai organisasi atau wadah untuk mencapai tujuan program adiwiyataakanberhasil apabila didalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak internal pendidikan maupun pihak eksternal pendidikan. Dalam hal ini, eksistensi sekolah-sekolah yang ada merupakan pendukung utama dari adanya Implementasi Pendidikan Sekolah

Peduli dan Berbudaya Lingkungan, sehingga eksistensinya itu menjadi strategis dalam upaya menciptakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang efektif.

Keberhasilan Implementasi Program Sekolah, sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini bukanlah sesuatu yang bersifat instan, mudah dicapai dan bisa terjadi begitu saja, tetapi hal tersebut merupakan sebuah proses yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam dari semua pihak yang berkompeten. Implementasi Kebijakan Program Adiwiyata perlu diupayakan melalui perencanaan yang baik, dengan strategi yang tepat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Implementasi merupakan hal yang penting dalam proses kebijakan, karena keberhasilan suatu kebijakan dapat ditentukan dari bagaimana upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas implementasi kebijakan Program Adiwiyata belum efektif dilaksanakan, karena dihadapkan dengan masalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, misalnya belum menjadikan program adiwiyata sebagai program prioritas sehingga terkendala dengan dukungan anggaran, dukungan sumberdaya dan fasilitas, serta rendahnya peran Kepala Sekolah yang dapat menentukan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, Kepala Sekolah belum memahami tentang Kebijakan Program Adiwiyata karena belum mendapat sosialisasi dan menganggap program tersebut hanya sukarela saja.
- b. Pemerintah dihadapkan dengan permasalahan siapa dan bagaimana kebijakan Program Adiwiyata dapat dilaksanakan. Kebijakan tersebut adalah kesepakatan dua kementerian yaitu antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi dalam implementasinya tidak sinergis.
- c. Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sinergis, belum terbentuk tim kerja implementasi kebijakan, sehingga masing-masing SKPD belum ada kerjasama yang efektif.

- d. Belum semua sekolah atau masyarakat mendapat sosialisasi tentang Program Adiwiyata, karena sosialisasi baru diberikan kepada sekolah yang ditunjuk atau mengajukan untuk menjadi model saja.
- e. Perencanaan operasinal belum optimal, dokumen perencanaan belum lengkap yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut, baik ditingkat Kabupaten sebagai Inisiator Implementasi Kebijakan maupun sekolah sebagai fokus dimana kebijakan dapat dilaksanakan.
- f. Pengelolaan sumber daya pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas baik yang mempunyai kompetensi Pendidikan Lingkungan Hidup, fasilitas sarana prasarana yang belum memadai, serta dukungan Anggaran yang belum memadai dalam mendukung Implementasi Kebijakan Program Adiwiyata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)”**.

2. Fokus Masalah Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata). Kemudian berdasarkan identifikasi masalah diatas rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana arah kebijakan yang ditempuh dalam implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri 1 Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung?
Arah kebijakan tersebut adalah dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan Program Adiwiyata.
- b. Bagaimana proses implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung?
Proses implementasi kebijakan Program Adiwiyata yaitu tahapan implementasi kebijakan yang dilaksanakan melalui proses adopsi kebijakan, sosialisasi kebijakan dan aksi kebijakan.

- c. Bagaimana strategi implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri Katapang Kabupaten Bandung?

Strategi implementasi yaitu upaya atau cara yang dilakukan, optimalisasi sumberdaya yang dimiliki yaitu dukungan SDM, dukungan anggaran dan dukungan fasilitas atau sarana prasarana.

- d. Bagaimana monitoring dan evaluasi hasil implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung?
- e. Bagaimana dampak implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran empirik tentang implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata), sedangkan secara khusus tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran empirik tentang:

1. Arah kebijakan yang di tempuh dalam implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung
2. Proses implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung
3. Strategi implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung
4. Monitoring dan evaluasi hasil implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung.

5. Dampak implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di SMP Negeri I Cimaung dan SMP Negeri I Katapang Kabupaten Bandung.
6. Merumuskan model hipotetik implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Beberapa Manfaat Teoritis atau Konseptual yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Membuktikan secara praktek tentang Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata).
- b. Merekomendasikan Model Hipotetik Implementasi Kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata).

2. Manfaat Praktis

Memberikan input kepada para pemangku kebijakan, dalam upaya meningkatkan implementasi kebijakan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur Disertasi ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang bagian awal dari penelitian yang terdiri dari: 1). Latar Belakang yang menjelaskan tentang permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) 2). Rumusan masalah, menjelaskan bagaimana permasalahan diidentifikasi sehingga menjadi permasalahan pokok yang harus diteliti. 3) Tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan, 4) Menjelaskan tentang metode penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan manajerial dan struktur organisasi penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori dan literatur yang sedang dikaji yaitu tentang Administrasi Pendidikan, konsep analisis kebijakan, efektivitas implementasi kebijakan, monitoring kebijakan. evaluasi kebijakan, strategi implementasi kebijakan, Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata), studi terdahulu yang relevan. Hal ini merupakan sebagai dukungan evidensi ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam disertasi ini dan sebagai pembanding dalam membahas hasil penelitian.

Bab III. Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang penjabaran metode penelitian, tentang lokasi dan objek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Bab IV Menyajikan Hasil Penilaian dan Pembahasan yang merupakan deskripsi dari temuan yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan membahas hasilnya sesuai dengan konsep yang ada.

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri atas Kesimpulan, Implikasi Penelitian, dan Rekomendasi.